

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dalam Komunikasi pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita hoaks kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

1. Kredibilitas komunikasi pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita hoaks oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat masih kurang maksimal dengan adanya strategi tersendiri untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Jawa Barat dan pada dasarnya masyarakat percaya kepada informasi yang dikeluarkan. Namun, klarifikasi hoaks atau fakta yang dijelaskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat kurang jelas sumbernya dan karena klarifikasi hoaks lebih diutamakan pada media online yang cakupannya sangat luas, sehingga Buzzer atau pembuat konten-konten negatif dapat menjadi ancaman dikarenakan media sosial dapat dengan bebas digunakan oleh siapa saja.
2. Daya tarik komunikasi pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita hoaks oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat kurang maksimal dengan memiliki strategi tersendiri seperti mengenal karakteristik masyarakat untuk memikat daya tarik masyarakat. Namun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

menggantungkan daya tarik melalui kebijakan atau Standar Operasional yang ada dan mengenal karakteristik masyarakat tanpa melihat respon penilaian masyarakat dan klarifikasi hoaks yang dilakukan belum cepat tanggap sehingga masyarakat tidak terlalu tertarik kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam penyuluhan pencegahan berita hoaks.

3. Power komunikasi pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita hoaks oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat belum maksimal karena dalam pencegahan penyebaran berita hoaks memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang ada melalui media-media online. Informasi terkait hoaks lebih tertuju kepada generasi milenial dan hukum bagi pelaku penyebaran hoaks kurang dijelaskan sehingga masyarakat tidak ada ketakutan untuk menyebarkan berita hoaks dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat memiliki kekurangan pada pengawasan.
4. Eksistensi komunikasi pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita hoaks oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat belum maksimal. Dalam eksistensi komunikasi memiliki strategi tersendiri dan belum secara maksimal menyadarkan masyarakat untuk tidak membuat dan menyebarkan hoaks dan dalam eksistensi media Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat kurang peminat dari masyarakat.
5. Setting komunikasi pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita hoaks oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Belum

Setting Komunikasi memiliki media online untuk melakukan komunikasi terkait hoaks yang lebih nyaman dan tetap adanya penyuluhan terkait hoaks secara langsung, namun masyarakat menilai masih kurang usaha yang dilakukan dalam menekan angka penyebaran berita hoaks di Jawa Barat.

6. Mekanisme penyampaian pesan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam pencegahan penyebaran berita hoaks belum maksimal dalam pencegahan penyebaran berita hoaks menggunakan media online seperti instagram, youtube, twitters, maupun sebuah website hal ini dapat menjadi peluang untuk menekan angka penyebaran berita hoaks di Jawa Barat. Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tidak melihat kepada masyarakat yang memiliki kekurangan atau kecacatan fisik seperti tidak bisa mendengar atau tuli.

4.2 Saran

Saran yang dapat peneliti ambil dalam Komunikasi pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita hoaks kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat , sebagai berikut :

1. Kredibilitas Klarifikasi hoaks yang diumumkan oleh Tim Jawa Barat Sapu Bersih Hoaks yang bernaungan dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat diharapkan bukan klarifikasi dari sumber lain melainkan bersumber sendiri dengan menyertakan bukti dari sumber klarifikasi sendiri.

2. Daya tarik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan strategi yang ada untuk menarik masyarakat agar tidak berkaitan dengan hoaks perlu untuk mengenal karakteristik masyarakat secara mendalam dan melihat respon masyarakat sehingga terbentuknya evaluasi baru dan klarifikasi hoaks yang dilakukan harus lebih cepat tanggap sehingga masyarakat tidak mudah tergiring oleh berita hoaks.
3. *Power* informasi terkait pencegahan penyebaran berita hoaks perlu di sebarakan secara merata tidak hanya terpaku kepada generasi milenial dengan dijelaskannya hukum yang berlaku terkait pembuat dan pencegahan hoaks dan perlu adanya peningkatan dalam pengawasan terkait hoaks.
4. Eksistensi komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat perlu adanya promosi media melalui media online ataupun langsung kepada masyarakat Jawa Barat sehingga masyarakat melihat eksistensi media yang dibuatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat untuk memberikan edukasi terkait hoaks secara online.
5. *Setting* komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat diperlukan lebih giat dan menyentuh atau bersinergi dengan masyarakat dalam bersosialisasi ataupun bermedia terkait hoaks.
6. Mekanisme penyampaian pesan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat perlu adanya inovasi dalam bermedia seperti klarifikasi hoaks dibuat juga untuk masyarakat dengan kecacatan fisik seperti tuli yang dibantu oleh bahasa isyarat karena masyarakat tuli tidak

bisa mendengar namun bisa membaca dan menulis sehingga sama besarnya potensi penyebaran berita hoaks dengan masyarakat yang tidak memiliki kecacatan fisik.